

42

# Menyongsong Polri Mandiri, Menjamin Keamanan Dengan Biaya Murah

Oleh : Let. Kol. Pol. Drs. Edward Raymond Pakasi

Keamanan itu mahal, pemeo sementara orang. Terbukti saat kerusuhan Jakarta medio 1998, tidak jarang warga di pemukiman dan pertokoan tertentu mengeluarkan dana jutaan saat ancaman menjadi bahaya nyata, berwujud gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtlibmas).

Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari di pemukiman kota besar, siskamling telah mengarah ke pengamanan oleh Satpam Protokim (proyek, pertokoan, pemukiman) dengan adanya imbalan dana keamanan oleh warga. Sedangkan di komunitas yang masih kental sifat gotong royong, siskamling sesuai hakekatnya

BHAKTI - DHARMA - WASPADA



masih berlanjut. Toh tetap juga dengan pengorbanan kepentingan diri, demi kepentingan orang banyak.

Memang tolok ukur situasi Kamtibmas, terletak di tempat-tempat seperti itu yakni tempat umum dan pemukiman, dimana terkonsentrasi lebih banyak warga. Tanpa harus terjadi di seluruh wilayah negara, apabila tempat terkonsentrasi banyak warga mengalami bahaya dan gangguan biaya tinggi terpaksa harus dikeluarkan oleh pemerintah maupun warga setempat. Baik untuk menanggulangi, memulihkan rasa aman maupun untuk menghindari tempat bahaya itu, bagi warga yang eksodus seperti halnya saat kerusuhan Jakarta, Solo dan Timor-Timur di tahun 1998.

Betapa tidak, gangguan keamanan dalam negeri (Kamdagri) artinya tanpa aliansi musuh dari negara lain, yang terjadi berupa pengrusakan ataupun pemberontakan seperti halnya di tiga tempat tersebut dan berbagai tempat lainnya di Jawa semenjak peristiwa Situbondo 1996 serta di Sumatera, Kalimantan dan Ujung Pandang ataupun OPM dan Aceh Merdeka pada waktu lalu, terpaksa ditanggulangi dengan cara pengerahan pasukan yang besar. Tidak jarang harus tergantung pada prosedur transportasi udara, sementara asset bahkan nyawa tetap tak tertolong, dalam arti tetap saja terlambat, apabila tidak memampukan Satuan Polri setempat. Inilah pokok masalahnya

Saat kerusuhan Jakarta medio 1998, tidak jarang warga di pemukiman dan pertokoan tertentu

mengeluarkan dana jutaan saat ancaman menjadi bahaya nyata, berwujud gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Oleh karena itu menyongsong Polri Mandiri dalam arti berkedudukan langsung di bawah Presiden seperti halnya lembaga penegak hukum lainnya, perlu ada upaya untuk memampukan Satuan Kewilayahan Polri setempat untuk kontrol dan memegang kendali keamanan di tempat-tempat umum serta pemukiman dimaksud agar diperoleh legitimasi dapat menjamin Kamtibmas di negeri ini. Mengintensifkan metode demikian masih jauh lebih efisien ketimbang bergantung pada pengarahan pasukan semata.

## DIVERSIFIKASI STRATEGI

Apabila konsep strategi yang ditempuh Polri selama ini, menutamakan pengamanan

saking rumitnya tugas itu sendiri termasuk protokoler dalam rangka kesepadanan instansi tingkat kecamatan, maupun karena adanya institusi lain yang mengambil alih kendali. Bila demikian akan menjadi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Padahal duplikasi penanganan ataupun stagnasi, tanpa kesediaan bertanggung jawab secara hukum, akan menumbuhkan kesan yang membekas bahwa suatu institusi tidak kapabel dan tidak mengerti hukum. Hal-hal seperti ini yang mungkin menjadi penyebab dari pokok permasalahan.

Keterbatasan atau kendala serta hambatan yang digambarkan itu, walaupun belum didukung hasil riset (Litbang) telah berdampak lebih jauh dengan ditemukannya distorsi pelayanan masyarakat di beberapa Polsek, seperti berikut :

- a. Laporan/pengaduan atas perkara berskala kecil (nominal maupun dampak) terkesan diterima formalitas saja, tanpa tindak lanjut yang serius, termasuk tidak ataupun adanya penanganan TKP sekalipun.
- b. Laporan ke kantor atau petugas Polisi terdekat tetapi tidak berwenang terkesan pelapor disuruh ke kantor Polisi atau petugas yang berwenang tanpa atensi menolong.
- c. Laporan melalui alat komunikasi masih sulit dilayani

- h. Mengharapkan adanya patroli rutin dan konsisten ternyata tidak.
- i. Patroli yang dilakukan, ada sebagian petugas yang cenderung mencari-cari kesalahan warga.
- j. Banyaknya petugas ditempat tertentu hanya karena pejabat mau lewat.
- k. Saat diperlukan, Polsek hanya dijaga dua orang, kadang kosong atau ditinggal tidur.

Tantangan berupa kendala ataupun hambatan demikian harus diatasi dan dengan memanfaatkan peluang, agar mampu menghadapi hakekat ancaman, sehingga memperoleh legitimasi.

Peluang besar nampak dari keinginan segala kalangan masyarakat agar Polri Mandiri, dalam arti tidak berkedudukan di bawah Menhankam Pangab. Kepedulian yang sangat tinggi ini pada gilirannya dapat berwujud partisipasi penuh mencapai tujuan Polri menjamin tertib dan tegaknya hukum, yang pada gilirannya dapat mendatangkan rasa aman, tenteram adil dan kestabilan sesuai tujuan hukum.

Akan tetapi partisipasi tidak datang sendiri bilamana pelayanan kepada masyarakat masih begitu-begitu saja. Ada juga petugas yang berdalih bahwa lain teori di Lembaga Pendidikan dengan praktek di lapangan. Apabila demikian, bukannya partisipasi masyarakat yang muncul,

Polisi di Jawa Barat pada tahun 1996-1997, terkenal dengan peristiwa Tasikmalaya, Pelabuhan Ratu dan Pemengpeuk-Garut. Sejumlah 22 kantor Polisi rusak saat kerusuhan Jakarta medio Mei 1998, sehingga tidak kurang dari 50 kantor Polisi se Indonesia yang dirusak dalam tiga tahun terakhir ini.

Terlepas dari adanya oknum penggerak, kalau memang proporsional pelayanan kepada masyarakat sekitar kantor Polisi, niscaya massa tidak akan mudah dihasut. Perlu riset lebih jauh, dalam rangka menentukan segera salah satu fokus untuk merebut legitimasi Polri Mandiri, di tengah dinamika transisi dewasa ini.

Sepertinya perlu ada upaya mengatasi tantangan di lini terdepan Polri dalam rangka legitimasi Polri mandiri, dengan memberikan bentuk baru dari konsep strategi yang ada atau diversifikasi strategi. Dapat dimulai dari sistem dan penyederhanaan tugas pokok di lini terdepan Polri itu. Upaya ini juga agar tidak menimbulkan kesalahan pada perilaku sebagian anggota Polsek semata sebagai satu-satunya penyebab, tanpa meninjau adanya hal yang bisa dibuat lebih baik pada sistem dan metode Polsek serta operasionalisasinya.

Strategi kontemporer yang telah banyak diterapkan di mancanegara secara saling mengadopsi guna mewujudkan partisipasi masyarakat sebagai peluang yang memungkinkan, dikenal dengan Strategi Pemberdayaan Masyarakat



Sepertinya perlu ada upaya mengatasi tantangan di lini terdepan Polri dalam rangka

legitimasi Polri mandiri, dengan memberikan bentuk baru dari konsep strategi yang ada atau diversifikasi strategi.

alami berbagai tantangan dan belum teratasi selama ini.

Di Singapura konsisten dengan konsep NPP (Nighbourhood Police Post), Amerika dengan konsep POPS (Problem Oriented Policing System), Inggris dengan "The English Concept of Community Constable". Sedangkan Pilipina mengintegrasikan konsep kedaerahan seperti "New Cops on the Blocks, Pulis Patrol Lingkod Bayan, Kababayan Center dan Kauban Model" ke dalam sistem "COPS" yang berintikan "Ronda" menurut bahasa Tagalog. Artinya ya Ronda Kampung itu.

Negara Asean lainnya mengadopsi sistem Pos Polisi "Koban" di Jepang yang asal muasalnya juga dari Perancis. Dengan "Koban System"

metika politik semata, tetapi dapatnya tercantum dalam dasar hukum bertugas, sesuai peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu dapat dipertimbangkan untuk menstrukturkan Babinkamtibmas sebagai Komandan Pos Polisi, menjadi sistem Pos Polisi sebagai organisasi Polri terkecil dan terdepan serta tersebar di tengah konsentrasi warga. Dengan banyaknya Pos Polisi selain semakin dekat dengan warga masyarakat, mengikuti detak jantung aspirasi, juga wahana untuk deteksi dan peringatan dini perkembangan ancaman.

Apabila kinerja Babinkamtibmas atau Komandan Pos Polisi ini beserta anak buahnya telah dapat dirasakan oleh warga dan pemerintahan setempat maka untuk membangunkan Pos Polisi, yang hanya ± 50 m<sup>2</sup> merupakan masalah yang sangat kecil, sangat murah, sebagaimana juga sudah dibangun di beberapa daerah selama ini.

Lagi pula dengan sistem dan operasionalisasi Polsek selama ini sepertinya tidak dapat menjangkau seluruh tempat umum dan pemukiman secara intensif. Sehingga lebih baik apabila Polsek diatur dalam sistem untuk back up dan saling mengisi dengan Pos Polisi dalam rangka kontrol tempat-tempat dimaksud.

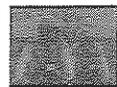
## TUGAS POKOK LEBIH SEREBHAN DAN STRATEGIS

Sehingga betapapun kecilnya Pos Polisi, dimotivasi untuk tanggung jawab mulia. Bukan terkesan "try and error" main-main dengan masalah keamanan yang menyangkut nyawa dan hak hidup warga. Juga bukan untuk kepentingan melibas gangguan yang terjadi saja, suatu model yang ibaratnya pemadam kebakaran semata. Terakhir inilah yang biayanya ekstra tinggi.

Sebagai perbandingan untuk diversifikasi strategi, dikemukakan sistem Pos Polisi atau "Koban System" di Jepang.

Tugas pokoknya hanya dua dan mudah dilaksanakan oleh setiap anggota Polisi yang baru lulus dari jenjang pendidikan apapun, dan menjadi kewajiban selama tujuh bulan "on the job training" dalam pendidikan perwira. Yaitu tugas "constant alert" (Samapta 24 jam) dan tugas "to deepen relationship with local communities" atau memperdalam hubungan baik dengan warga melalui pelaksanaan tugas-tugas di Pos Polisi.

Substansi tugasnya meliputi : menolong warga yang kesulitan, Turjawali, TPTKP, Deteksi Dini, Polisi Tempat Bertanya, Kunjungan Rumah/Tempat Bisnis (house visit), pengirim-



Betapapun kecilnya Pos  
Polisi, dimotivasi untuk

an pamflet berita Kamtibmas sekitar Pos dan melayani panggilan darurat pada telepon 110 serta melayani setiap laporan atau pengaduan warga. Setiap langkah yang diambil dicatat dan dilaporkan, melalui jurnal atau mutasi. Laporan kejadian dilaporkan melalui alat komunikasi ke Puskodalops (CCC) di kantor Polisi atasannya. Penyidikan dan upaya paksa juga dilakukan oleh kantor Polisi atasannya. (Police Station).

Terdapat dua jenis Koban yaitu Hashutsujo (police box) dan Chuzaisho (live in or residential police box). Pos Polisi Kota dan Pos Polisi Desa. Kurang lebih 6500 Pos di Kota yang mengontrol tempat umum dan pemukiman dalam area minimal 1 km<sup>2</sup> dengan penduduk sekitar 12.000 jiwa, dan  $\pm$  9.500 Pos Polisi di pedesaan untuk area sekitar 8 km<sup>2</sup>.

Bangunan Pos terbesar  $\pm$  50 m<sup>2</sup> berlantai 10 termasuk empat lantai bawah tanah, terdapat di pusat kehidupan malam terbesar se-Asia di Kabukicho, Shinjuku Tokyo. Satunya lagi di "Amusement Centre" Osaka, yang di waktu siang sepi hanya disibukkan oleh kira-kira 300 orang, tetapi di malam hari sekitar 3.000 orang berseliweran. Terkecil berupa Pos sementara ukuran 4 m<sup>2</sup> di Stasiun kereta api atau dermaga, sekedar tempat untuk duduk bergantian.

Chuzaisho biasanya hanya satu orang, si komandan Pos saja, sedangkan di Hashutsujo memiliki empat "ploeg" anak buah. Sesuatu

Akan mencegah dan menghindarkan perbuatan tercela karena akan terkontrol dengan budaya malu; setidak-tidaknya malu dihadapan keluarga.

"Koban System" tercantum dalam peraturan perundang-undangan Jepang dan memperoleh legitimasi warga, sehingga dilukiskan bahwa mereka tak akan pernah mimpi sekalipun untuk hidup tanpa "Koban" (Pos Polisi). Tradisi koban ini sudah melembaga sejak Shogun Tokugawa di tahun 1600.

Memang manfaatnya dalam menunjang kesejahteraan rakyat dengan menciptakan Kamtibmas (daily life of security and public order) sangat kasat mata dan langsung terkesan serta dirasakan, terutama ditempat-tempat umum dan pemukiman.

Pengantar susu, surat khabar ataupun makanan ke gedung-gedung bertingkat, dengan Honda Tiger tanpa mesin dimatikan leluasa meninggalkan motornya ditepi jalan, menjadi pemandangan biasa. Demikian juga sepeda anak yang bergeletakan di lorong-lorong, sampai datangnya patroli koban untuk meminggirkan agar tidak mengganggu lalu lintas. Tidak jarang terlihat wanita pulang sendirian menuju rumahnya dari kereta terakhir di tengah malam, menembus kegelapan taman dan jalan sepi.

"The Safest Country in the World" bukan kosmetika politik belaka, oleh negara yang se-